

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAYA SAING
INDUSTRI KELAPA SAWIT RIAU**

Nina*, Suardi Tarumun dan Ahmad Rifai****

Abstract

The research aimed to analyze the competitiveness of the crude palm oil (CPO) production and formulating the improvement strategy of the International market competitiveness of the CPO in Dumai. The research was conducted in Dumai, Riau Province. The Policy Analysis Matrix (PAM) was conducted to analyzed the competitiveness of the CPO production. The research result shows that the CPO production in Dumai was internationally competitive, it was indicated by the Domestic Ratio Cost (DRC), and it was 0.30. It has financial competitiveness also with the Private Cost Ratio of 0.12. The CPO production was gained from the combination impact of policy transfer from both tradable input and output, with the *effective protection coefficient* (EPC) value of 0.85. This means that government policy is not able to provide greater added value or protection by providing incentives. CPO prices do not provide real benefits to producers of CPO or palm oil farmers to produce. In addition, the profitability coefficient (PC) value was 1.07. It indicated that the financial profit was higher, it was 1.07 times higher than the social profit. Furthermore, the subsidy ratio to producers (SRP) which was the measurement from the combination of all transfer effects indicated the value of 0.05, which means divergency between the financial and social profit approximately around 5% from the gross profit. According to the PCR score which was smaller than DRC, it could be inferred that the palm oil plantation business in Dumai City is actually still in need of the government intervention to support of the International market competitiveness of the CPO.

Keywords: *competitiveness, CPO, palm oil, PAM, Dumai.*

* *Nina* adalah Mahasiswa Jurusan Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau, Pekanbaru

** *Suardi Tarumun* dan *Ahmad Rifai* adalah Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau, Pekanbaru

I. PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan komoditi yang paling mendominasi luas areal perkebunan di Indonesia. Data Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2013 menunjukkan bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai 10,586,500 Ha, paling luas dibandingkan dengan komoditi tanaman tahunan lainnya. Perkebunan kelapa sawit terdiri dari perkebunan rakyat dan perkebunan besar.

Demikian juga di Kota Dumai, sampai dengan akhir tahun 2014 luas kebun kelapa sawit 37,129 Ha dengan produksi 79,884.16 ton CPO.

Tahun 2013 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi industri kelapa sawit baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tekanan harga minyak sawit mentah/ crude palm oil (CPO) di pasar global berlangsung sepanjang tahun. Harga CPO hanya berada di harga rata-rata US\$ 841.71 per metrik ton. Jika dibandingkan dengan harga rata-rata tahun 2012 US\$ 1,028.40 per metrik ton, harga mengalami penurunan sekitar 18%. Tekanan penurunan harga disebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan di negara Uni Eropa.

Dampak dari tekanan harga dan perlambatan permintaan global adalah turunnya nilai ekspor CPO. Perubahan nilai ekspor CPO dan penurunan harga berpengaruh terhadap jumlah permintaan dan menurunnya penerimaan sehingga berdampak pada daya saing CPO Indonesia.

Input berupa pupuk dan pestisida mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian, termasuk tanaman kelapa sawit. Penggunaan pupuk yang berimbang sesuai kebutuhan tanaman dan pengendalian Organisme Pangganggu Tanaman (OPT) pada tanaman kelapa sawit telah membuktikan mampu memberikan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Namun harga pupuk yang cenderung naik dan pestisida yang mahal membuat biaya produksi petani meningkat.

Untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi petani dan produsen CPO, pemerintah menerapkan kebijakan input (subsidi pupuk dan upah minimum tenaga kerja) dan kebijakan output (pajak ekspor CPO) dengan tujuan untuk membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan

dari produksi CPO. Perubahan biaya produksi yang terjadi diduga akan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh sehingga akan berdampak pada daya saing CPO.

Selain alokasi input dan tingkat perolehan output, kebijakan pemerintah terhadap harga input dan output kelapa sawit juga sangat mempengaruhi dinamika industri kelapa sawit. Oleh sebab itu daya saing industri kelapa sawit menjadi menarik untuk diteliti, apakah industri kelapa sawit yang dilakukan petani memiliki daya saing yang kuat terhadap pasar Internasional.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis daya saing industri kelapa sawit (keunggulan kompetitif dan komparatif)
2. Menganalisis dampak kebijakan input (subsidi pupuk dan upah minimum tenaga kerja) dan kebijakan output (pajak ekspor CPO) terhadap daya saing industri kelapa sawit
3. Menganalisis sensitivitas perubahan kebijakan input (subsidi pupuk dan upah minimum tenaga kerja) dan kebijakan output (pajak ekspor CPO) terhadap daya saing industri kelapa sawit.

II. METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian yaitu Tahun 2015. Posisi Kota Dumai yang strategis serta berdekatan dengan Negara Malaysia dan Singapura sangat mendukung untuk kegiatan ekspor termasuk hasil pengolahan kelapa sawit yaitu Crude Palm Oil (CPO), sehingga memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain di Provinsi Riau.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data input produksi, produksi dan harga setiap faktor produksi CPO.

Data yang berkaitan dengan usahatani kelapa sawit berupa faktor produksi (bibit, pupuk, herbisida, tenaga kerja, dan peralatan) diperoleh dari Struktur Input Output Fisik per Hektar Komoditas Kelapa Sawit (Sesrianti, 2015). Data biaya pengolahan CPO diperoleh dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Murini Sam Sam Kota Dumai.

Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode PAM (*Policy Analysis Matrix*). Matrik PAM dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. *Policy Analysis Matrix* (PAM)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Input Tradable	Input Non Tradable	
Harga pasar	A	B	C	$D = A - (B + C)$
Harga sosial	E	F	G	$H = E - (F + G)$
Divergensi	$I = A - E$	$J = B - F$	$K = C - G$	$L = D - H$

Sumber : Monke and Pearson (1989)

- a) Penerimaan, biaya dan keuntungan privat (simbol A, B, C dan D) didasarkan pada data yang diperoleh dari usahatani maupun pengolahan hasil. Keuntungan privat merupakan indikator daya saing (*competitiveness*). Apabila $D > 0$, berarti sistem komoditas tersebut memperoleh profit diatas normal.
- b) Penerimaan, biaya dan keuntungan pada tingkat harga sosial (simbol E, F, G dan H). Harga sosial (harga efisiensi) untuk input maupun output tradabel adalah harga Internasional untuk barang yang sejenis (*comparable*) (harga CIF untuk komoditas yang diimpor dan harga FOB untuk komoditas yang diekspor). Harga sosial harus ditentukan pada waktu, bentuk/ kualitas dan lokasi yang sama.
Sosial Profitability (SP) atau keuntungan sosial merupakan indikator keuntungan komparatif (*comparative advantage*) atau efisiensi dari sistem komoditas pada kondisi tidak ada divergensi dan penerapan kebijakan yang efisien, apabila $H > 0$.
- c) *Divergences* timbul karena adanya distorsi kebijakan atau kegagalan pasar. Kedua hal tersebut menyebabkan harga aktual berbeda dengan harga efisiensi. Efek divergensi adalah selisih antara baris pertama (usahatani yang diukur dengan harga privat) dengan baris kedua (usahatani yang diukur dengan harga sosial). Oleh karena itu, $I = A - E$, $J = B - F$, $K = C - G$, dan $L = D - H$.

Efisiensi Finansial dan Efisiensi Ekonomi

- *Private Cost Rasio* (PCR) = $C/(A - B)$

Apabila nilai PCR < 1 dan nilainya makin kecil, berarti sistem produksi usahatani kelapa sawit semakin kompetitif dan mampu membiayai faktor domestiknya pada harga privat dan kemampuannya tersebut akan meningkat. Sebaliknya bila, PCR = 1, sistem komoditas yang diteliti tidak memiliki keunggulan kompetitif.

- *Domestic Resources Cost Ratio* (DRCR) = $G/(E - F)$

Jika DRCR < 1, maka sistem komoditas mempunyai keunggulan komparatif. Sebaliknya jika DRCR = 1 sistem komoditas tidak memiliki keunggulan komparatif.

Dampak Kebijakan Pemerintah

- Kebijakan terhadap output

Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO) = A / E jika nilai NPCO > 1. Semakin besar nilai NPCO, berarti semakin besar tingkat proteksi pemerintah terhadap output, sebaliknya bila NPCO = 1, kebijakan bersifat disinsentif.

- Kebijakan terhadap input

Nominal Protection Coefficient on Tradable Input (NPCI) = B / F

NPCI merupakan indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap harga input domestik. Jika nilai NPCI < 1, berarti kebijakan bersifat protektif terhadap input, ada kebijakan subsidi terhadap input *tradable*, sebaliknya bila NPCI = 1, berarti tidak ada kebijakan protektif terhadap input/ tidak ada kebijakan subsidi terhadap input *tradable*

- Kebijakan Terhadap Input-Output

Effective Protection Coefficient (EPC) = $(A - B) / (E - F)$

EPC merupakan indikator yang menunjukkan tingkat proteksi simultan terhadap output dan input *tradable*. Kebijakan masih bersifat protektif, jika nilai EPC > 1. Semakin besar nilai EPC, berarti semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap komoditas domestik.

Profitability Coefficient (PC) = D / H

Koefisien keuntungan adalah perbandingan antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen dengan keuntungan bersih sosialnya. Jika $PC > 0$, berarti secara keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan perlindungan atau proteksi atau subsidi kepada konsumen, demikian juga sebaliknya.

$$\text{Subsidy Ratio to Producer (SRP)} = L / E$$

Rasio subsidi produsen (SRP) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penerimaan pada harga sosial yang diperlukan apabila subsidi atau pajak digunakan sebagai pengganti kebijakan. Nilai SRP yang negatif menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang berlaku selama ini menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya imbalan (*opportunity cost*) untuk berproduksi dan sebaliknya jika nilai SRP positif.

Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat bagaimana hasil analisis suatu aktivitas ekonomi bila terjadi perubahan terhadap harga output dan input.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asumsi Makro

Beberapa asumsi makro yang dipakai untuk analisis *Policy Analysis Matrix* (PAM) adalah tingkat suku bunga nominal dan suku bunga sosial (persen per tahun), serta nilai tukar (Rupiah per US Dollar) yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Asumsi Ekonomi Makro

Asumsi ekonomi makro	Jumlah
Tingkat suku bunga nominal (% per tahun)	22.50%
Tingkat suku bunga sosial (% per tahun)	19.40%
Nilai tukar rupiah (Rp./\$) asumsi APBN 2015	11,900.-

Sumber : Bank Indonesia (2015) dan Kementerian Keuangan RI (2015).

Struktur Input Output Fisik

Struktur input-output fisik ditingkat petani dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. *Input tradable* (barang-barang input yang diperdagangkan) yaitu pupuk Urea, SP 36, dan KCl
2. *Input non tradable* yaitu bahan organik dan obat-obatan, peralatan yang digunakan, serta penggunaan tenaga kerja, modal kerja, dan sewa tanah
3. Produksi (output) yang dihasilkan.

Harga Privat dan Harga Sosial

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa harga bibit kelapa sawit yang ditanam oleh petani di Kota Dumai Rp. 27,000.-/batang. Harga pupuk Urea adalah Rp. 1,800.-/kg, harga SP-36 Rp. 2,000.-/kg, harga KCl Rp. 5,700.-/kg, dan harga pupuk organik Rp. 950.-/kg, serta harga herbisida Round up Rp. 21,600.-/liter. Harga peralatan yang digunakan pada usahatani kelapa sawit ini adalah cangkul Rp. 95,000.-/unit, parang Rp. 90,000.-/unit, alat dodos Rp. 115,000.-/unit dan hand sprayer Rp. 450,000.-/unit. Untuk penggunaan tenaga kerja, diperoleh data upah tenaga kerja untuk jenis kegiatan persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen dan pasca panen serta pemasaran sebesar Rp. 50,000.-/hari. Sedangkan nilai sewa lahan dalam satu tahun di lokasi penelitian sebesar Rp. 15,000,000.-. Harga TBS di tingkat petani dan harga CPO berfluktuatif tergantung pada harga CPO dunia, dan pada tahun 2015 harga rata-rata TBS di daerah penelitian adalah Rp. 936.67 dan harga CPO Rp. 5,603.-/kg.

Harga sosial untuk pupuk SP 36 dan KCl adalah harga paritas impor, sedangkan harga sosial Urea dan CPO adalah harga paritas ekspor. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Indonesia adalah importir pupuk SP 36 dan KCl serta eksportir untuk pupuk Urea dan CPO.

Harga sosial pupuk organik, herbisida dan peralatan (cangkul, parang, alat sadap, dan hand sprayer) diasumsikan sama dengan harga private atau aktual. Begitu juga harga sosial tenaga kerja diasumsikan sama dengan harga privat (tingkat upah aktual di lokasi penelitian) karena tidak ditemui distorsi kebijakan maupun kegagalan pasar di pedesaan. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa harga sosial lahan di Kota Dumai adalah sebesar Rp. 74,657,592.-/ha.

PAM Multi Period Kelapa Sawit di Kota Dumai

Komoditi kelapa sawit merupakan komoditi perkebunan dengan siklus tanaman yang relatif lama yaitu sampai 19 tahun. Untuk komoditas yang masa tanam dan panennya (siklus produksi) berlangsung dalam waktu yang panjang, digunakan PAM multi-period. Perhitungan PAM untuk komoditas dengan rentang waktu yang panjang seperti itu memerlukan tabel PAM untuk setiap periode, kemudian dihitung *net present value* (NPV) seluruh periode tersebut. Rumus untuk menghitung NPV untuk penerimaan adalah sebagai berikut:

$$NPVR = \sum_{t=1}^n \frac{R}{(1-i)^t}$$

dimana :

- i = tingkat suku bunga (*interest rate*)
- t = jumlah periode
- n = periode t terakhir dari nilai R yang diharapkan.

Budget privat dan budget sosial diperoleh dengan mengalikan kuantitas input-output fisik/Ha dengan harga *net present value* privat dan sosial per unit masing-masing komponen.

Hasil analisis PAM multi-period komoditi kelapa sawit secara privat dan sosial selama 19 tahun di Kota Dumai disajikan pada Tabel 3. Secara privat menunjukkan bahwa rata-rata total penerimaan (*total revenue*) CPO adalah sebesar Rp. 274,422,476.-/ha dengan total biaya (*total cost*) yang merupakan input tradabel sebesar Rp. 4,297,089.-/ha dan faktor domestik sebesar Rp. 32,834,761.-/ha, maka keuntungan finansial CPO dari industri kelapa sawit di Kota Dumai adalah sebesar Rp. 237,290,626.-/ha.

Sedangkan secara sosial, menunjukkan bahwa rata-rata total penerimaan (*total revenue*) CPO adalah sebesar Rp. 328,309,679.-/ha dengan total biaya (*total cost*) yang merupakan input tradabel sebesar Rp. 9,843,101.-/ha dan faktor domestik sebesar Rp. 96,484,852.-/ha, maka

keuntungan ekonomi CPO dari industri kelapa sawit di Kota Dumai adalah sebesar Rp. 221,981,725.-/ha.

Tabel 3. Tabel PAM Industri Kelapa Sawit Kota Dumai Tahun 2015

Uraian	Penerimaan	Input Tradable	Faktor Domestik				Keuntungan Bersih	R/C
			Tenaga Kerja	Modal	Lahan	Total		
Privat	274,422,476	4,297,089	8,153,987	12,435,876	12,244,898	32,834,761	237,290,626	7.39
Sosial	328,309,679	9,843,101	8,153,987	13,673,272	74,657,592	96,484,852	221,981,725	3.09
Divergensi	(53,887,203)	(5,546,013)	-	(1,237,397)	(62,412,694)	(63,650,091)	15,308,901	

Berdasarkan perhitungan rasio total penerimaan terhadap total biaya di atas, diperoleh nilai R/C atau PBCR (*private benefit-cost ratio/ (A/(B+C))*) sebesar 7.39 dan nilai R/C atau SBCR (*social benefit-cost ratio/ (E/F+G)*) sebesar 3.09. Dapat dikatakan bahwa industri kelapa sawit di Kota Dumai secara finansial dan ekonomi layak, karena rasio R/C atau PBCR dan R/C atau SBCR lebih besar dari 1.

Dengan diperolehnya nilai keuntungan finansial maupun keuntungan ekonomi industri kelapa sawit diatas adalah positif, maka dapat dikatakan industri kelapa sawit tersebut memiliki keuntungan kompetitif dan keuntungan komparatif dalam menggunakan sumberdaya ekonomi.

Dari analisis PAM dapat diketahui adanya divergensi yang merupakan alat analisis kebijakan dan dampak dari kebijakan tersebut. Terjadinya perbedaan nilai privat (output dan input) dibandingkan dengan nilai-nilai sosialnya mungkin disebabkan oleh adanya kebijakan yang terdistorsi atau pasar berjalan tidak sempurna sehingga gagal menciptakan pasar yang efisien yang menyebabkan harga privat (harga pasar aktual) berbeda dengan harga sosialnya (harga efisiensi atau *social opportunity cost*).

Dari Tabel 3 diperoleh data bahwa divergensi dalam penerimaan pada industri kelapa sawit di Kota Dumai sebesar Rp. (53,887,203.-)/ha disebabkan oleh perbedaan harga privat yang diterima petani dengan harga sosialnya. Nilai negatif menunjukkan bahwa terdapat transfer penerimaan dari produsen (petani) kepada konsumen atau konsumen membeli dan produsen (petani) menerima dengan harga yang lebih rendah dari harga seharusnya.

Divergensi input yang diperdagangkan (*tradable*) dan faktor domestik pada industri kelapa sawit bernilai negatif yaitu sebesar Rp. (5,546,013.-)/ha dan Rp. (63,650,091.-)/ha. Hal ini berarti terdapat kebijakan yang menghasilkan harga privat yang lebih rendah atau petani sebagai konsumen membayar harga input secara keseluruhan lebih murah daripada harga sosialnya (pasar Internasional). Nilai negatif pada divergensi input tradabel dan input non tradable menunjukkan adanya kebijakan subsidi dari pemerintah.

Divergensi keuntungan bersih (*net profit*) industri kelapa sawit adalah sebesar Rp. 15,308,901.-/ha. Nilai divergensi keuntungan bersih (*net profit*) yang positif, dapat dikatakan bahwa terdapat kebijakan insentif pada industri kelapa sawit di Kota Dumai yang membuat surplus pada petani bertambah atau kebijakan insentif membuat industri kelapa sawit menjadi efisien.

Daya Saing Komoditas Kelapa Sawit di Kota Dumai

Hasil analisis dengan menggunakan metode *Policy Analysis Matrix* (PAM) menunjukkan bahwa nilai rasio sumberdaya domestik atau *Domestic Resource Cost* ($DRC = G/(E-F)$) industri kelapa sawit di Kota Dumai adalah 0.30 dan rasio biaya privat ($PCR = C/(A-B)$) adalah 0.12 artinya industri kelapa sawit mempunyai daya saing Internasional karena nilai DRC dan PCR kecil dari 1 (Tabel 4).

Selain itu juga diketahui bahwa nilai PCR pada industri kelapa sawit mempunyai nilai yang lebih rendah daripada nilai DRC-nya, atau $PCR < DRC$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanpa adanya kebijakan pemerintah, untuk menghasilkan satu unit nilai tambah memerlukan faktor domestik yang lebih besar dibandingkan dengan adanya kebijakan. Dengan kata lain masih diperlukan kebijakan pemerintah untuk menunjang daya saing pada nilai ekonomis (Internasional).

Tabel 4. Rasio PAM Industri Kelapa Sawit di Kota Dumai Tahun 2015

No	Rasio	Nilai
1	DRC (<i>Domestic Resource Cost</i>) $(G / (E - F))$	0.30
2	PCR (<i>Privat Cost Ratio</i>) $(C / (A - B))$	0.12
3	NPCO (<i>Nominal Protection Coefficient on Output</i>) (A / E)	0.84
4	NPCI (<i>Nominal Protection Coefficient on Input</i>) (B / F)	0.44
5	EPC (<i>Effective Protection Coefficient</i>) $(A - B) / (E - F)$	0.85
6	PC (<i>Profitability Coefficient</i>) (D / H)	1.07
7	SRP (<i>Subsidy Ratio to Producers</i>) (L / E)	0.05

Dampak Kebijakan Input Output

Dampak kebijakan secara keseluruhan baik terhadap input maupun output dapat dilihat dari NPCO (*Nominal Protection Coefficient on Output*), NPCI (*Nominal Protection Coefficient on Input*), EPC (*Effective Protection Coefficient*), PC (*Profitability Coefficient*), SRP (*Subsidy Ratio to Producers*) (Tabel 4). Analisis dampak kebijakan pada penelitian ini dilakukan untuk melihat sampai sejauh mana kebijakan pemerintah memberikan perlindungan terhadap petani domestik, baik kebijakan harga input maupun kebijakan harga output.

Nilai NPCO industri kelapa sawit di Kota Dumai adalah 0.84 atau petani menerima harga output (privat) sebesar 84% dari harga dunia. Industri kelapa sawit di Kota Dumai memiliki NPCO < 1, berarti produsen kelapa sawit tidak mendapat proteksi dari pemerintah atau adanya kebijakan pemerintah yang menghambat komoditi dengan pajak atau hambatan ekspor.

Nilai NPCI industri kelapa sawit di Kota Dumai adalah 0.44. Nilai NPCI yang lebih kecil dari satu menunjukkan bahwa terdapat proteksi terhadap produsen input tradabel dan sektor yang menggunakan input tersebut yaitu produsen (petani). Pelaku usahatani kelapa sawit diuntungkan dengan rendahnya harga input tradabel. Itu berarti petani membayar 56% lebih murah dari harga sosialnya. Murahannya input tradabel tersebut disebabkan oleh subsidi dari pemerintah berupa pupuk.

Nilai EPC industri kelapa sawit di Kota Dumai adalah 0.85. Nilai EPC menunjukkan rasio kecil dari satu, Hal ini berarti kebijakan pemerintah tidak mampu memberikan nilai tambah yang

lebih besar atau adanya perlindungan atau proteksi pemerintah terhadap CPO dengan memberikan insentif harga CPO tidak memberikan keuntungan secara nyata bagi produsen CPO atau petani kelapa sawit untuk berproduksi.

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa nilai PC industri kelapa sawit di Kota Dumai adalah 1.07. Nilai ini menunjukkan keuntungan privat (finansial) yang lebih besar, yaitu lebih dari 1.07 kali lipat dari keuntungan sosial (ekonomis). Berdasarkan nilai PC ini dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan berbagai kebijakan pemerintah yang diterapkan pada industri kelapa sawit mengakibatkan keuntungan bertambah. Nilai SRP industri kelapa sawit adalah 0.05. Artinya divergensi antara keuntungan finansial dan ekonomi pada industri kelapa sawit adalah sekitar 5% dari pendapatan kotor (*gross profit*).

Analisis Sensitivitas

Pada analisis ini diasumsikan usahatani kelapa sawit terjadi suatu kondisi yang tidak menguntungkan seperti berikut :

- 1) Terjadi penurunan harga bayangan output CPO sebesar 20%

Rasio	Nilai Basis	Harga Bayangan Output Turun 20 %
DRC	0.30	0.38
PCR	0.12	0.12
NPCO	0.84	1.04
NPCI	0.44	0.44
EPC	0.85	1.07
PC	1.07	1.52
SRP	0.05	0.31

- 2) Subsidi pupuk urea dan SP-36 dihilangkan sehingga biaya produksi meningkatkan menurunkan keuntungan privat dan pada akhirnya menurunkan daya saing

Rasio	Nilai Basis	Subsidi Input 0 %
DRC	0.30	0.30
PCR	0.12	0.13
NPCO	0.84	0.84
NPCI	0.44	0.83
EPC	0.85	0.84
PC	1.07	1.05
SRP	0.05	0.03

- 3) Berubahnya nilai tukar yang berdampak terhadap keuntungan sosial. Untuk itu digunakan 2 (dua) pilihan nilai tukar alternatif, yaitu nilai rupiah menguat (apresiasi) menjadi 10,500 per \$ US dan nilai rupiah melemah (depresiasi) menjadi 13,000 per \$ US.

Rasio	Nilai Basis	Nilai Tukar	
		Rp. 10,500.-/US\$	Rp. 13,000.-/US\$
DRC	0.30	0.34	0.28
PCR	0.12	0.12	0.12
NPCO	0.84	0.95	0.76
NPCI	0.44	0.50	0.40
EPC	0.85	0.96	0.78
PC	1.07	1.29	0.94
SRP	0.05	0.18	(0.04)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Industri kelapa sawit di Kota Dumai dinyatakan memiliki daya saing secara Internasional (keunggulan komparatif), yang ditunjukkan oleh nilai rasio sumberdaya domestik (DRC) yang dihasilkan lebih kecil dari satu, yaitu sebesar 0,30. Namun nilai EPC industri kelapa sawit di Kota Dumai adalah 0.85. Nilai EPC menunjukkan rasio kecil dari satu. Hal ini berarti kebijakan pemerintah tidak mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar atau adanya perlindungan atau proteksi pemerintah terhadap CPO dengan memberikan insentif harga CPO tidak memberikan keuntungan secara nyata bagi produsen CPO atau petani kelapa sawit untuk berproduksi.
2. Disamping memiliki daya saing secara Internasional (keunggulan komparatif), industri kelapa sawit di Kota Dumai juga memiliki daya saing secara finansial (keunggulan kompetitif) yang ditunjukkan oleh nilai rasio biaya privat (PCR) yang dihasilkan lebih kecil dari satu, yaitu sebesar 0.12.

3. Industri kelapa sawit di Kota Dumai telah mendapat proteksi atau perlindungan output dari pemerintah berupa subsidi positif sehingga meningkatkan keuntungan privat petani dan kebijakan insentif ini membuat industri kelapa sawit menjadi efisien.

Saran

1. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai PCR (0.12) lebih kecil dari nilai DRC (0.30). Hal ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit di Kota Dumai masih tetap memerlukan campur tangan pemerintah untuk menunjang daya saing pada nilai ekonomi (Internasional).
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa industri kelapa sawit di Kota Dumai layak untuk terus dikembangkan karena memiliki daya saing finansial (keunggulan kompetitif) dan daya saing ekonomi (keunggulan komparatif). Hal ini ditandai dengan nilai DRC lebih kecil dari 1 yaitu 0.30 dan nilai PCR lebih kecil dari 1 yaitu 0.12.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim., 2008, *Teknologi Budidaya Kelapa sawit*, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Departemen Pertanian.
- Badan Pusat Statistik., 2015, *Dumai Dalam Angka 2015*, Badan Pusat Statistik Kota Dumai, Dumai.
- Bank Indonesia., 2015, Kurs dan Inflasi, <http://www.bi.go.id>, diakses 10 Januari 2016.
- Eriyati dan Rosyetti., 2013, *Analisis Daya Saing Ekspor Komoditi Crude Palm Oil (CPO) Provinsi Riau*, Jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Riau
- Kadariah., 1988, *Evaluasi Proyek Analisa Ekonomis*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Monke, E. A. and E. S. Pearson., 1989, *The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development*, Cornell University Press, London.
- Oemar, A dan A. Mulyana., 2006, Daya Saing Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Selatan sebagai Subsektor yang Diintervensi Pemerintah, *Jurnal Sosio Ekonomika Vol.12, No.1, Juni 2006*, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Pearson, et.al., 2005, *Aplikasi Policy Analysis Matrix pada Pertanian Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Porter, Michael E., 1990, *Competitive Advantage of Nations*, New York.

Sesrianti., 2015, *Analisis Daya Saing Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi*, Magister Agribisnis, Universitas Riau, Pekanbaru